

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka akan dipaparkan tinjauan penelitian dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pemaparan teori akan dimulai dari kaitan fokus penelitian dengan administrasi publik, dan akan diakhiri dengan kerangka pemikiran penulis yang dibangun dari teori yang akan dibahas selanjutnya.

2.1. Peneliti Terdahulu

Tabel 1 - Tabel Peneliti Terdahulu

| No | Nama dan Judul | Sumber | Metode Penelitian | Hasil | Perbedaan |
|----|--|---|-------------------|--|---|
| 1. | Doddy Prayogo <i>“Evaluasi Program Corporate Social Responsibility dan Community Development pada Industri Tambang dan Migas”</i> | Jurnal Evaluasi Program Corporate Social Responsibility dan Community Development pada Industri Tambang dan Migas. Makara Human Behavior Studies in Asia, 2011, 15(1), 43-58. | Post Postivism | Korporasi telah melaksanakan program CSR dan CD secara baik. | 1. Fokus & Lokus Penelitian yang Berbeda 2. Metode Penelitian yang berbeda |

| | | | | | |
|----|--|--|-------------------|---|--|
| 2. | Fanaqi C dan Pratiwi M <i>”Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Narkoba Di Garut”</i> | Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian, Vol. 5; No. 1; 2019, Hal 160-176 | Metode Kualitatif | Partisipasi masyarakat dalam sangatlah penting dalam pencegahan Narkoba | 1. Fokus & Lokus Penelitian yang Berbeda |
| 3. | Norma Laili Ihksan <i>”Implementasi Program Desa Vokasi Berbasis Pelatihan Kewirausahaan Tata Boga”</i> | Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 4, No. 2, 2017, Hal , 133-145 | Metode Kualitatif | Mengatasi kebutuhan sebagian besar penduduk dan memastikan pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan di wilayah tersebut dan mata pencaharian pedesaan daerah tersebut. | 1. Fokus & Lokus Penelitian yang Berbeda |
| 4. | D. Mansfield <i>“Alternative Development: The Modern Thrust of</i> | Jurnal UNODC, Vol 51, Nos. 1 and 2, 1999 | Metode Kualitatif | Kesimpulan dari penelitiannya menjelaskan untuk menciptakan kebijakan | 1. Lokus Penelitian yang Berbeda |

| | | | | | |
|----|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| | <i>Supply Side Policy</i> | | | Alternative Development yang efisien dan efektif serta berkelanjutan | |
| 5. | N. Andrew, P.Speer, C.Peterson “ <i>Pathways to empowerment in substance abuse prevention: Citizen participation, sense of community, and police responsiveness in an urban U.S. setting. Global Journal of Community Psychology Practice</i> , 1(3), 23-31. | Jurnal Pathways to empowerment in substance abuse prevention: Citizen participation, sense of community, and police responsiveness in an urban U.S. setting. Global Journal of Community Psychology Practice, 1(3), 23-31. | Metode Kualitataif | Penelitian ini menyimpulkan tentang memperluas wawasan dalam pencegahan berbasis komunitas. Pencegahan berbasis masyarakat sering mengandalkan peningkatan kesadaran, partisipasi, dan pemberdayaan di penduduk komunitas | 1. Lokus Penelitian yang Berbeda |

2.2. Kerangka Konsep

2.2.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan Publik merupakan hubungan pemerintah dengan unit-unit dalam lingkungan pemerintahan. Hubungan antar unit-unit dalam lembaga pemerintahan adalah sebagai bentuk dari kebijakan yang bersumber secara *top-down*¹. Pada hakikatnya atasan mempunyai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh bawahan, baik secara kelembagaan atau pun personal. Dalam pengaplikasiannya kebijakan dapat diterapkan pada individu, organisasi, sektor swasta dan pemerintahan. Kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting dalam sebuah organisasi maupun pemerintahan.

Pada pengertiannya ada banyak sekali pendapat tentang definisi kebijakan menurut para ahli. Smith dan Larimer di dalam bukunya mengemukakan tentang berbagai pendapat tentang kebijakan. *Policy is whatever governments choose to do or no to do*. Kebijakan itu adalah apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Defini tersebut mengartikan bahwa kebijakan dibuat dan dibentuk oleh pemerintah bukan dilakukan oleh pihak swasta.²

Sementara kebijakan itu suatu Tindakan yang objektif dan pernyataan pemerintah pada hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil (atau bahkan berujung gagal dalam pengambilan keputusan) untuk melaksanakannya, dan penjelasan mereka berikan untuk apa yang terjadi (atau tidak terjadi).

¹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : ALFABETA, 2014), hal.8

² B. Smith & C. Larimer, *The Public Policy Theory Primer*, (New York : Routeledge, 2018), hal.

Kebijakan publik memiliki tingkatan, secara sederhana adanya rentetan atau tingkatan, kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni:

1. Kebijakan publik yang bersifat umum atau makro, atau bahkan mendasar, yaitu:

UUD1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan

Peraturan Daerah.

2. Kebijakan Publik yang bersifat meso, menengah atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati. Kebijakannya berupa bentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.
3. Kebijakan Publik yang bersifat mikro merupakan kebijakan yang mengatur implementasi atau pelaksanaan dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Wali kota dan Bupati.³

Menurut beberapa pendapat ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan merupakan sebuah keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan-kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk diimplementasikan dan dipertanggung jawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah. Suatu kebijakan yang diusulkan dalam rangka memberikan solusi terhadap persoalan yang sedang terjadi.

³ Riant Nugroho D, Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2006) Hal. 31

Kebijakan sendiri bertujuan menyelesaikan persoalan yang ada secara tuntas, bukan menyelesaikan persoalan dengan cara menimbulkan persoalan baru. Tetapi dengan adanya kebijakan diharapkan permasalahan dapat terkendali dan terselesaikan dan menjadi solusi atas permasalahan tersebut.⁴

2.2.2. Kebijakan Publik

Begitu banyak definisi kebijakan publik telah diberikan oleh para sarjana dan ahli kebijakan. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh otoritas untuk kebaikan bersama. Di balik setiap kebijakan publik pasti ada proses perumusan dan evaluasi. Pembahasan berlangsung pada tataran implementasi kebijakan. Semua proses kebijakan publik saling berhubungan, tidak bisa saling melemahkan, sebaliknya harus saling menguatkan. Sehingga kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan optimal.

Kebijakan publik adalah sekumpulan kegiatan atau tindakan yang diusulkan oleh suatu pemerintah, kelompok atau seseorang dalam lingkungan tertentu dengan hambatan atau kesulitan dan peluang atau peluang dimana kebijakan itu diusulkan. berguna untuk mengatasinya guna mencapai tujuan yang diinginkan.⁵

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan kutipan tentang kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa bersifat umum atau khusus, bisa sangat sederhana atau kompleks, bisa luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, publik atau privat, bersifat kualitatif atau kuantitatif.

⁴ Loc. cit

⁵ Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Kebijakan makna yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program atau mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau bahkan suatu rencana.⁶

Kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

1. Kebijakan publik selalu memiliki tujuan tertentu atau mempunyai Tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan;
2. Kebijakan publik mana berisi tindakan-tindakan pemerintah;
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan;
4. Kebijakan publik yang diusulkan bisa bersifat positif dalam arti, tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5. Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknyanya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.⁷

Dapat di simpulkan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk nyata dimana pemerintah yang berkuasa mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembangunan di daerah itu sendiri.

⁶ Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal. 1-2

⁷ Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik, Pt. Buku Kita: Jakarta.

2.2.3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan Publik meruakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk diikuti oleh satu atau lebih aktor dalam menghadapi suatu masalah atau kepentingan.⁸ Serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang ditempuh dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Dalam sebuah buku Implementasi terdiri dari penulisan program dan kebijakan umum yang terlihat bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi mengubahnya menjadi kata atau slogan yang beresonansi dengan telinga para pemimpin dan pemilih yang mendengarnya⁹

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi terjadi setelah pengesahan undang-undang yang memberikan mandat program, pedoman, manfaat, atau hasil yang nyata. Istilah implementasi mencakup tindakan oleh beberapa aktor. Secara khusus, para birokrat menginginkan program ini terus berlanjut.¹⁰

Implementasi kebijakan publik mempunyai 3 unsur, diantaranya :

1. Unsur Pelaksana (implementor) adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik

⁸ James E Anderson, Publick Policy Making, (New York : Holt, Rinehart and Winston, 1984), Hal 17

⁹ Agustino, Loc. Cit.

¹⁰ Budi Winarno. Op.cit. hal 149

2. Program yg akan dilaksanakan : kebijakan yang bersifat umum perlu dijabarkan kedalam program yang bersifat operasional . *Implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect.*
3. Target group, yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.¹¹

Dari Banyaknya pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat ditarik kesimpulan, bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahap yang sangat krusial, dimana dilakukan oleh para pelaksana kebijakan melalui tahapan-tahapan yang didalamnya terdapat serangkaian program atau kegiatan dan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

2.2.4. Program

Dasar pemikiran yang dibahas dalam penyusunan studi ini adalah bahwa implementasi dan program harus didefinisikan terlebih dahulu sehingga pentingnya implementasi program itu sendiri menjadi lebih jelas. Pada suatu buku mendefinisikan program sebagai sesuatu yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu dengan harapan menghasilkan suatu hasil atau dampak.¹²

Program adalah suatu rencana, jelas dan spesifik karena tujuan, prosedur, pedoman, anggaran dan waktu pelaksanaannya sudah ditetapkan.¹³ Selain itu,

¹¹ Abdullah, Syukur, 1988. Laporan temukajian posisi dan peran ilmu administrasi Negara dan manajemen, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Asia Foundation. Hal 8

¹² Ibid.

¹³ Hasibuan, Malayu S.P, 2006, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Bumi Aksara : Jakarta. Hal 27

pengertian program juga tertuang dalam undang-undang Republik Indonesia yang mengatur:

“Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat”.¹⁴

Padahal, setelah program diimplementasikan, bisa berhasil, kurang berhasil, atau gagal sama sekali, tergantung hasil yang dicapai dan bentuk hasilnya. Berbagai faktor berperan dalam proses ini, dan dapat diketahui pengaruhnya dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan program.

Berdasarkan beberapa definisi teori profesional, penulis berpendapat bahwa implementasi program adalah suatu kegiatan yang didukung oleh kebijakan, prosedur, dan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai hasil yang baik dalam mencapai tujuan. individu atau kelompok. dan tujuan yang ditetapkan.

2.2.5. Keberhasilan Program

Konsep keberhasilan program adalah penggunaan sejumlah infrastruktur, sumber daya, yang telah ditentukan sebelumnya, untuk menghasilkan sekumpulan barang atau jasa kegiatan yang dilakukan oleh individu atau badan. Menurutnya, program tersebut memiliki ciri-ciri keberhasilan sebagai berikut:

1. Tujuan yang ingin dicapai.
2. Berapa lama untuk menyelesaikan tugas tertentu.

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Jumlah biaya yang dibutuhkan dan sumbernya.
4. Jenis kegiatan yang dilakukan.
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan, baik jumlah maupun kualifikasinya.¹⁵

Keberhasilan kebijakan atau keberhasilan program diantaranya dapat dikaji berdasarkan perspektif proses dan perspektif hasil, berikut:

1. Perspektif proses : kebijakan pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain menentukan kelompok sasaran, aktor pelaksana, langkah pelaksanaan program serta dampak program.
2. Perspektif hasil : program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan.¹⁶

efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya tujuan suatu organisasi. Sebuah organisasi bekerja secara efektif ketika mencapai tujuannya. Budiani mengatakan efektivitas program dapat diukur dengan menggunakan variabel-variabel berikut:

1. Ketepatan Sasaran dengan kata lain, seberapa baik pelanggan program mencapai tujuan yang diberikan.

¹⁵ Dewi S, Julita, Yowisa P, Nurtia Siregar, Risa S, Yohana M, , Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Infrastruktur, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5. No. 2 Des 2021, P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328.

¹⁶ Feis, Imronah. "Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya." Gema Eksos, vol. 5, no. 1, 2009.

2. Sosialisasi program Artinya, kemampuan penyelenggara program untuk mensosialisasikan program sehingga informasi tentang pelaksanaan program, dan khususnya tujuan program, dapat dikomunikasikan kepada masyarakat.
3. Tujuan program Dengan kata lain, seberapa baik hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan.
4. Pemantauan program Dengan kata lain, aktivitas pasca-kinerja program difokuskan pada pelanggan.

Setiap orang yang ingin sukses atau sejahtera dalam menjalankan suatu program atau kegiatan kerja harus memiliki prinsip-prinsip internal. Hanya orang yang berprinsip yang dapat bekerja sesuai dengan aturan dan komitmen yang ditetapkan dan disepakati oleh semua rekannya. Baik itu terhadap penegak maupun terhadap kelompok sasaran.¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi ahli di atas, konsep keberhasilan program adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau tujuan, diukur dengan kuantitas, kualitas, dan waktu menurut metrik yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2.6. Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan sudah cukup lama kita kenal, seiring dengan bertambahnya angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia, tidak cuma menimpa masyarakat yang berada di pedesaan saja tetapi juga masyarakat perkotaan juga. Sudah cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang dikeluarkan

¹⁷ Hendrawati Hamid, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, Makassar: De La Macca, 2018.

pemerintah ataupun oleh organisasi sosial/kemasyarakatan dan organisasi profesi. Itu semua merupakan upaya untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi belum

Pemberdayaan dapat dijabarkan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti, pakaian (sandang), makan (pangan), rumah (papan), pendidikan, kesehatan. Memberikan kekuatan atau power kepada orang yang kurang berkompeten karna tidak mampu atau bisa dikatakan miskin, memang merupakan tanggungjawab pemerintah tetapi seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, khususnya masyarakat dikawasan itu sendiri yang menjadi target sasaran, yang nantinya mereka akan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan

Di Indonesia, istilah pemberdayaan sudah dikenal pada tahun 1990-an , baru setelah konferensi Beijing 1995 pemerintah Indonesia memakai istilah yang sama. Dalam berproses istilah pemberdayaan sudah menjadi wacana publik dan bahkan seringkali dijadikan kata kunci bagi kemajuan maupun keberhasilan pembangunan didalam masyarakat. Paradigma pemberdayaan merupakan paradigma pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia, suatu proses pembangunan yang menumbuhkan inisiatif masyarakat dari bawah ke atas

18

Pemberdayaan adalah suatu proses yang merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok

¹⁸ Ibid., 68

rentan. Ini termasuk orang yang menderita kemiskinan. Pemberdayaan sebagai suatu proses berfokus pada kemampuan untuk berpartisipasi, menangkap peluang, dan mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.¹⁹

Dengan memahami teori para ahli, penulis memberi kesimpulan bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses perencanaan dengan cara-cara tertentu yang meningkatkan kebermanfaatan objek yang diberdayakan.

2.2.7. Pemberdayaan Alternatif

Awalnya, pengembangan alternatif adalah sebuah konsep yang ditujukan untuk memberantas obat-obatan seperti opium dan kokain.

”Pembangunan alternatif adalah paradigma pembangunan baru, istilah yang mungkin diperkenalkan oleh UNODC pada pertengahan 1990-an. Akar konsep pemberdayaan alternatif dapat ditelusuri kembali ke akhir tahun 1940-an, ketika pemerintah China berhasil memberantas budidaya opium ilegal di daerah penghasil utama seperti bagian barat daya China daratan, yaitu Yunnan.”²⁰

Konsep Pemberdayaan Alternatif merupakan konsep yang dikembangkan oleh UNODC pada pertengahan tahun 1990-an. Konsep tersebut dipinjam dari keberhasilan China mengakhiri penanaman opium. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai kegiatan sosial dimana warga kelompok masyarakat mengorganisasikan diri dengan mengembangkan rencana dan tindakan kolektif

¹⁹ Rena Julika, Irma Irawati, "Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mendorong Pembangunan Desa, Jurnal , Publik Corner, Vol. 11 No. 2, 2016, hal 7

²⁰ McCoy & Rerkasem, "A Manual On Monitoring and Evaluation for Alternative Development projects, Hal 9, 2000.

untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber dayanya.

Robert Chambers adalah ilmuwan, salah satu pakar, pemikirannya dan idenya sebagian besar didedikasikan untuk kepentingan kemajuan pemberdayaan masyarakat. Robert Chambers berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan yang mewujudkan nilai-nilai sosial.²¹

2.2.8. Tujuan Pemberdayaan

- A. Pemberdayaan alternatif memiliki dua tujuan. Yaitu, untuk mengurangi pasokan bahan baku produksi farmasi, bagian ini menekankan pengembangan alternatif seperti: Upaya untuk mengurangi pasokan dari produksi farmasi. Dengan kata lain, pemberdayaan substitusi ini berdampak positif karena mampu menghentikan obat melalui pemberdayaan substitusi.
- B. Mengintegrasikan ekonomi ilegal dan memungkinkan kawasan untuk kembali ke pembangunan ekonomi dan sosial negara yang normal. Bagian ini menekankan pemberdayaan alternatif agar pembangunan dapat fokus pada dimensi ekonomi dan sosial. Ini karena keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan adalah faktor yang mendorong penggunaan narkoba. Elemen strategis untuk mencapai penguatan alternatif yang memenuhi harapan disorot.
 1. Penggantian pendapatan (strategi keuangan dan produktif). Artinya, ada hak alternatif yang dapat mengalihkan profesi ilegal yang mereka geluti ke profesi hukum.

²¹ Hendrawati Hamid, Loc.Cit., 77

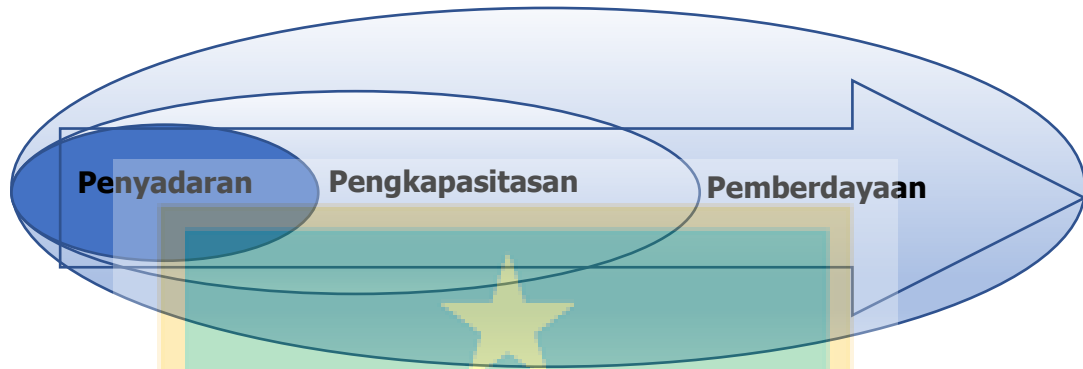
2. Menciptakan kondisi damai dan legalitas (strategi politik), yaitu petani yang tidak berpindah mata pencaharian ditangkap karena ada pembangunan alternatif yang dapat menjamin keamanannya.
3. Penguatan organisasi petani (strategi organisasi). Artinya ada alternatif pengembangan yang dapat mendukung kepemimpinan organisasi petani lokal.
4. Meningkatkan kualitas hidup mereka yang terlibat (strategi sosial). Artinya, pembangunan alternatif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.
5. Difusi model pembangunan berkelanjutan (strategi lingkungan), i.H. Adanya alternatif pembangunan yang dapat mentransfer keberhasilan program yang dilaksanakan ke daerah lain. Dan
6. Pemberdayaan masyarakat (strategi sosial) dalam memerangi narkoba. Artinya ada alternatif pembangunan yang dapat memberdayakan masyarakat dalam memerangi narkoba.²²

Tujuan dari pemberdayaan alternatif adalah mengubah kawasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba menjadi kawasan bebas narkoba, menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Selain itu, mengembangkan kapasitas individu dan komunitas untuk keluar dari kecanduan

²² Hendrawati Hamid, Loc.Cit

perdagangan narkoba dan beralih ke profesi hukum, atau untuk mencegah non-pengguna dan non-pengedar bersentuhan dengan narkoba, juga penting.²³

Gambar 1 - Proses Pemberdayaan



Sumber: Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, "Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat", 2007

2.2.9. Tahapan Pelaksanaan Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan sebelum sampai pada proses pelaksanaan program pada hakikatnya dalam pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan tindakan permulaan dan pendekatan yang bagus dengan komunitas. tindakan permulaan tersebut termasuk

1. Pra program

- Pemetaan lokasi dan mensurvey dengan tepat pada sasaran yang ingin dituju

- Rapat kerja Stakeholder serta membangun kepercayaan dengan cara sosialisasi

2. Pelaksanaan Program

²³ Feis, Imronah. "Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya." Gema Eksos, vol. 5, no. 1, 2009.

- Membentuk Fasilitator atau melibatkan para pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat untuk memahami kondisi masyarakat sasaran
- Penyuluhan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya dihadapi
- Pelatihan Keterampilan meningkatkan kemampuan masyarakat yang akan diupayakan dalam proses pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan
- Monitoring dan Evaluasi sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan kegiatan, sekaligus merumuskan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya

3. Pasca Program

- Penyusunan program lanjutan untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan parapihak untuk menentukan keberlangsungan program
- Dampak program untuk mengetahui hasil dari pelatihan keterampilan²⁴

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teori Widodo keberhasilan kebijakan atau keberhasilan program diantaranya dapat dikaji berdasarkan perspektif proses dan perspektif hasil

1. Perspektif proses : kebijakan pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain menentukan kelompok sasaran, aktor pelaksana, langkah pelaksanaan program serta dampak program.

²⁴ Loc.cit

2. Perspektif hasil : program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan.²⁵



²⁵ Feis, Imronah. "Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya." Gema Eksos, vol. 5, no. 1, 2009.

Gambar 2 - Kerangka Berpikir

